



**BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);



3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);



26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
33. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 11);
34. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);



35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 825) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);



41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 8 Nomor 2008);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2011 Nomor 1);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2016;
46. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 4);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 5);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
49. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 9);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 Nomor 6);



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
dan
BUPATI LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
- laporan realisasi anggaran;
 - laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - neraca;
 - laporan operasional;
 - laporan arus kas;
 - laporan perubahan ekuitas; dan
 - catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja, Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah dan Ikhtisar Laporan Keuangan Pemerintahan Pekon/ Desa Tahun Anggaran 2018.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2018 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp 1.124.189.349.605,07
b. Belanja	Rp 1.109.753.247.079,66
Surplus/(Defisit) (a-b)	Rp 14.436.102.525,41
c. Pembiayaan	
1. Penerimaan	Rp 27.576.853.952,81
2. Pengeluaran	Rp 1.500.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Neto (1-2)	Rp 26.076.853.952,81

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp19.027.144.642,69 dengan rincian sebagai berikut :
- Anggaran Pendapatan setelah perubahan Rp 1.143.216.494.247,76
 - Realisasi Rp 1.124.189.349.605,07
- Selisih Lebih/(Kurang) (1-2) Rp 19.027.144.642,69



b) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp59.550.029.520,91 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp 1.169.303.276.600,57
2. Realisasi	Rp 1.109.753.247.079,66
Selisih Lebih/(Kurang) (1-2)	Rp 59.550.029.520,91

c) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp40.522.884.878,22 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Surplus/defisit Setelah Perubahan	(Rp 26.086.782.352,81)
2. Realisasi	Rp 14.436.102.525,41
Selisih Lebih/(Kurang) (1-2)	Rp 40.522.884.878,22

d) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp9.928.400,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Setelah Perubahan	Rp 27.586.782.352,81
2. Realisasi	Rp 27.576.853.952,81
Selisih Lebih/(Kurang) (1-2)	Rp 9.928.400,00

e) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Setelah Perubahan	Rp 1.500.000.000,00
2. Realisasi	Rp 1.500.000.000,00
Selisih Lebih/(Kurang) (1-2)	Rp 0,00

f) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp9.928.400,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Setelah Perubahan	Rp 26.086.782.352,81
2. Realisasi	Rp 26.076.853.952,81
Selisih Lebih/(Kurang) (1-2)	Rp 9.928.400,00

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp 27.586.782.352,81
b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan	(Rp 27.576.853.952,81)
c. Sub Total (a - b)	Rp 9.928.400,00
d. SiLPA Tahun Berjalan	Rp 40.512.956.478,22
e. Sub Total (c + d)	Rp 40.522.884.878,22
f. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	(Rp 9.928.400,00)
g. Saldo Anggaran Lebih Akhir (e - f)	Rp 40.512.956.478,22

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember 2018 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp 2.174.055.841.417,68
b. Jumlah Kewajiban	Rp 7.528.367.176,95
c. Jumlah Ekuitas	Rp 2.166.527.474.240,73

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 Desember 2018 sebagai berikut :

a. Pendapatan Operasional	Rp 1.033.665.822.316,86
b. Beban Operasi	(Rp 792.272.174.344,35)
c. Beban Transfer	(Rp 56.923.068.751,00)
d. Surplus dari kegiatan non operasional lainnya	(Rp 3.079.791.620,00)
e. Beban Luar Biasa	(Rp 1.255.835.240,00)
Surplus/ (Defisit) Laporan Operasional	Rp 180.134.952.361,51

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan per 31 Desember 2018 sebagai berikut :

a. Saldo Kas 1 Januari 2018	Rp 27.825.259.937,73
b. Arus Kas dari Aktivitas Operasi	Rp 304.646.348.807,87
c. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	(Rp 290.210.246.282,46)
d. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan	(Rp 1.500.000.000,00)
e. Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran	(Rp 282.496.515,80)
f. Saldo Kas akhir per tanggal 31 Desember 2018	Rp 40.478.865.947,34

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan per 31 Desember 2018 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp 1.963.490.479.281,09
b. Surplus/ (Defisit) - LO	Rp 180.134.952.361,51
c. Lain-lain	Rp 22.902.042.598,13
d. Ekuitas Akhir	Rp 2.166.527.474.240,73

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2018 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.



Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran;
 - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan Pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan Pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan Pemerintahan daerah, organisasi, program, dan kegiatan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah.



Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal, 17 Juli 2019
BUPATI LAMPUNG BARAT,


PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal, 17 Juli 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,


AKMAL ABD. NASIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2019 NOMOR 1

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Bpk	
5	B. Dambanngman	
6	Inspektur	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT,
PROVINSI LAMPUNG NOMOR: 01/870/LB/2019

Nomor	Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1	2	3	4	5	6
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00	2.400.000.000,00
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00	2.400.000.000,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Hutang	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00	2.400.000.000,00
	Pembiayaan Neto	26.086.782.352,81	26.076.853.962,81	99,96	80.835.274.347,11
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)		40.512.956.478,22		27.586.782.352,81

BUPATI LAMPUNG BARAT,


PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI		PARAF
NO	JABATAN	
1	SEKDAKAB	
2	ASSTEN I	
3	ASSTEN II	
4	BPKD	
5	B. Pembangunan	
6	Instansi terkait	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05.2.05.01.37.06.	LOMBA KELOMPOK PERIKANAN TINGKAT KABUPATEN	50.000.000,00	49.352.500,00	(647.500,00)	98,71	
2.05.2.05.01.37.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.175.000,00	7.175.000,00	0,00	100,00	
2.05.2.05.01.37.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	42.825.000,00	42.177.500,00	(647.500,00)	98,49	
2.05.2.05.01.37.07.	SEKOLAH LAPANG CBIB DAN CPIB	90.000.000,00	89.990.000,00	(10.000,00)	99,99	
2.05.2.05.01.37.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
2.05.2.05.01.37.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	80.000.000,00	79.990.000,00	(10.000,00)	99,99	
	JUMLAH PENDAPATAN	71.340.000,00	71.430.000,00	90.000,00	100,13	
	JUMLAH BELANJA	7.466.486.135,00	7.268.116.944,00	(198.369.191,00)	97,34	
	- SURPLUS/(DEFISIT)	(7.395.146.135,00)	(7.196.686.944,00)	198.459.191,00	97,32	
	JUMLAH KESELURUHAN PENDAPATAN	1.143.215.494.247,76	1.124.189.349.605,07	(19.027.144.642,69)	98,34	
	JUMLAH KESELURUHAN BELANJA	1.168.303.276.600,57	1.109.753.247.079,66	(58.550.029.520,91)	94,91	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(26.088.782.352,81)	14.438.102.525,41	40.527.884.878,22	(55,34)	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI			
NO	JABATAN	PARAF	REVISI
1	SEKIDAKAB		
2	ASISTEN I		
3	ASISTEN II		
4	Bpkd		
5	B. Pambanngman		
6	Inspektorat		
7			
8			
9			
10	KABAG HUKUM		

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN					REALISASI				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		JENIS BELANJA			JUMLAH	JENIS BELANJA			JUMLAH			
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL				
		1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	(Rp)
2.05.2.05.01.36.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PEMINGKATAN DAYA SARANG	26.325.000,00	511.125.000,00	96.550.000,00	735.000.000,00	26.325.000,00	611.619.250,00	93.800.000,00	731.544.250,00	(3.453.750,00)	99,33	
2.05.2.05.01.36.01.	PRODUK PERIKANAN											
2.05.2.05.01.36.01.	GEMARIKAN DAN LOMBA MASAK IKAN	2.100.000,00	122.500.000,00	0,00	125.000.000,00	2.100.000,00	122.635.000,00	0,00	124.735.000,00	(265.000,00)	99,79	
2.05.2.05.01.36.02.	DIVERSIFIKASI PRODUK HASIL PERIKANAN	2.000.000,00	24.450.000,00	3.550.000,00	30.000.000,00	2.000.000,00	23.255.000,00	1.500.000,00	26.855.000,00	(3.145.000,00)	89,52	
2.05.2.05.01.36.03.	MONITORING PRODUK USAHA PERIKANAN	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	49.999.250,00	0,00	49.999.250,00	(750,00)	100,00	
2.05.2.05.01.36.04.	PENYEDIAAN SARANA PEMABARAN HASIL PERIKANAN	750.000,00	40.250.000,00	0,00	50.000.000,00	750.000,00	40.250.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
2.05.2.05.01.36.05.	PEMBERDAYAAN KELOMPOK MASYARAKAT PENGAWAS (POMASWAS)	6.400.000,00	83.600.000,00	0,00	90.000.000,00	6.400.000,00	83.558.250,00	0,00	89.956.250,00	(43.750,00)	99,95	
2.05.2.05.01.36.06.	PENGENDALIAN SUMBER DAYA IKAN DI PERAIRAN UMUM	9.975.000,00	250.005.000,00	0,00	260.000.000,00	9.975.000,00	250.023.750,00	0,00	259.998.750,00	(1.250,00)	100,00	
2.05.2.05.01.36.07.	NORMALISASI PERAIRAN UMUM EMBUNG	1.350.000,00	6.650.000,00	92.000.000,00	100.000.000,00	1.350.000,00	6.650.000,00	92.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
2.05.2.05.01.36.08.	PEMBINAAN IKAN USAHA PERIKANAN	3.750.000,00	26.250.000,00	0,00	30.000.000,00	3.750.000,00	26.250.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
2.05.2.05.01.37.	PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KELOMPOK	31.175.000,00	338.825.000,00	0,00	370.000.000,00	31.175.000,00	337.293.500,00	0,00	368.468.500,00	(1.531.500,00)	99,59	
2.05.2.05.01.37.01.	PELATIHAN TEKNIK PENANGKAPAN IKAN YANG RAMAH LINGKUNGAN	8.000.000,00	82.000.000,00	0,00	90.000.000,00	8.000.000,00	81.930.500,00	0,00	89.930.500,00	(960.500,00)	99,93	
2.05.2.05.01.37.03.	PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN KELOMPOK PERIKANAN	0,00	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00	0,00	89.528.500,00	0,00	89.528.500,00	(470.500,00)	99,48	
2.05.2.05.01.37.04.	PEMBINAAN KEMITRAAN USAHA PERIKANAN	6.000.000,00	44.000.000,00	0,00	50.000.000,00	6.000.000,00	43.857.000,00	0,00	49.857.000,00	(343.000,00)	99,31	
2.05.2.05.01.37.06.	LOMBA KELOMPOK PERIKANAN TINGKAT KABUPATEN	7.175.000,00	42.825.000,00	0,00	50.000.000,00	7.175.000,00	42.177.500,00	0,00	49.352.500,00	(647.500,00)	98,71	
2.05.2.05.01.37.07.	SEKOLAH LAPANG CBIB DAN CPIB	10.000.000,00	80.000.000,00	0,00	90.000.000,00	10.000.000,00	79.990.000,00	0,00	89.990.000,00	(10.000,00)	99,99	
	JUMLAH BELANJA	254.450.000,00	2.933.185.000,00	1.977.400.000,00	5.665.131.000,00	253.700.000,00	2.889.119.427,00	1.861.872.000,00	5.064.791.427,00	(60.329.573,00)	98,81	
	TOTAL JUMLAH BELANJA	62.550.064.747,00	255.154.805.797,37	205.730.970.877,00	813.535.847.421,37	59.139.109.897,20	236.063.404.332,00	204.210.246.282,48	585.412.850.511,66	(28.122.994.939,71)	95,42	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI		PARAF
NO	JABATAN	
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	Bpkd	
5	Bx pambangunan	
6	Inspektoral	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah/ (Berkurang)	
				(Rp)	%
				5=4-3	6
1	2	3	4		
06.	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	181.557.297.533,00	179.662.950.537,00	(1.894.346.996,00)	98,96
06. 1. 03.	PEKERJAAN UMUM	175.143.866.533,00	173.250.329.537,00	(1.893.536.996,00)	98,92
06. 1. 04.	PERUMAHAN	6.413.431.000,00	6.412.621.000,00	(810.000,00)	99,99
07.	KESIHATAN	184.418.038.850,65	189.766.627.275,03	(11.323.711.245,62)	92,06
07. 1. 02.	KESIHATAN	173.359.783.508,65	162.036.072.263,03	(11.323.711.245,62)	93,47
07. 1. 12.	KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA	11.058.255.342,00	7.730.555.012,00	(3.327.700.330,00)	69,91
08.	PARIWISATA DAN BUDAYA	5.952.642.000,00	5.877.983.392,00	(74.658.608,00)	98,75
08. 1. 17.	KEBUDAYAAN	919.837.000,00	899.966.945,00	(19.870.055,00)	97,84
08. 2. 04.	PARIWISATA	5.032.805.000,00	4.978.016.447,00	(54.788.553,00)	98,91
10.	PENDIDIKAN	296.127.453.955,00	279.420.129.252,00	(16.707.324.703,00)	94,36
10. 1. 01.	PENDIDIKAN	284.278.182.732,00	268.002.675.173,00	(16.275.507.559,00)	94,27
10. 1. 18.	PEMUDA DAN OLAHRAGA	8.213.193.916,00	7.924.200.692,00	(288.993.224,00)	96,48
10. 1. 26.	PERPUSTAKAAN	3.636.077.307,00	3.493.253.387,00	(142.823.920,00)	96,07
11.	PERLINDUNGAN SOSIAL	13.899.003.253,00	13.382.242.116,00	(516.761.137,00)	96,28
11. 1. 10.	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	6.090.637.567,00	5.831.382.760,00	(259.254.807,00)	95,74
11. 1. 11.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.191.038.000,00	1.137.123.076,00	(53.914.924,00)	95,47
11. 1. 13.	SOSIAL	6.617.327.686,00	6.413.736.280,00	(203.591.406,00)	96,92
	JUMLAH BELANJA	1.169.303.276.600,57	1.109.753.247.079,66	(59.550.029.520,91)	94,91

BUPATI LAMPUNG BARAT,


PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI	
NO	UMAHATI
1	SETIARAB
2	ASISTEN I
3	ASISTEN III
4	Bpk
5	B. Pambayungan
6	Inspektoral
7	
8	
9	
10	KABAG HUKUM

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
 NOMOR 1 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2018



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
 PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

NO	URAIAN	2018	2017
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	27.586.782.352,81	83.235.274.347,11
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	27.576.853.952,81	83.235.274.347,11
3	Subtotal (1-2)	9.928.400,00	0,00
4	Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	44.144.268.172,02	27.586.782.352,81
5	Subtotal (3+4)	44.154.196.572,02	27.586.782.352,81
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	(9.928.400,00)	0,00
7	Lain-lain	0,00	0,00
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)	44.144.268.172,02	27.586.782.352,81

BUPATI LAMPUNG BARAT,


 PAROSIL MABSUS

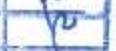
PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	Bpk	
5	B. Pambangkungan	
6	Inspektoral	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

NO	U R A I A N	2018	2017	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
1	2	3	4	5	6
43	BEBAN TRANSFER				
44	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak	975.098.500,00	936.605.300,00	38.493.200,00	4,11
45	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	131.921.000,00	140.871.800,00	(8.950.800,00)	(6,35)
46	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	346.371.568,00	0,00	346.371.568,00	100,00
47	Beban Transfer Bantuan Keuangan Desa	54.798.403.000,00	55.571.525.700,00	(773.122.700,00)	(1,39)
48	Beban Transfer Keuangan Lainnya	671.274.683,00	671.274.683,00	0,00	0,00
49	Jumlah Beban Transfer (44 s.d. 48)	56.923.068.751,00	57.320.277.483,00	(397.208.732,00)	(0,69)
50	JUMLAH BEBAN (42 + 49)	849.195.243.095,35	886.332.841.515,94	(37.137.598.420,59)	(4,19)
51	SURPLUS/ (DEFISIT) DARI OPERASI (30-50)	184.470.579.221,51	116.209.500.344,15	68.261.078.877,36	58,74
52	SURPLUS/ (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
53	Surplus Penjualan Aset Nonlancar	33.086.400,00	(663.650.000,00)	696.736.400,00	0,00
54	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Defisit Penjualan Aset Nonlancar	(104.959.600,00)	0,00	(104.959.600,00)	#DIV/0!
56	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/ (DEFISIT) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(3.007.918.420,00)	635.250.882,00	(3.643.169.302,00)	0,00
58	JUMLAH SURPLUS/ (DEFISIT) DARI KEG. NON OPERASIONAL(53 s.d. 57)	(3.079.791.620,00)	(28.399.118,00)	(3.051.392.502,00)	10.744,67
59	SURPLUS/ (DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA (51+58)	181.390.787.601,51	116.237.899.462,15	65.152.888.139,36	56,05
60	POS LUAR BIASA				
61	Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Beban Luar Biasa	1.255.835.240,00	1.186.333.270,00	69.501.970,00	5,86
63	POS LUAR BIASA (61-62)	(1.255.835.240,00)	(1.186.333.270,00)	(69.501.970,00)	5,86
64	SURPLUS/ (DEFISIT)-LO (59 + 63)	180.134.952.361,51	115.051.566.192,15	65.083.386.169,36	56,57

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

BUPATI LAMPUNG BARAT,


PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETOAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN III	
4	Bpkd	
5	B. Pembangunan	
6	Inspektorat	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
 NOMOR 1 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2018



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2018	2017
1	2	3	3
1	EKUITAS AWAL	1.963.490.479.281,09	1.820.297.689.172,79
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	180.134.952.361,51	115.051.566.192,15
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR :		
4	Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
5	Selisih Revaluasi Aktiva Tetap	0,00	2.864.471.000,00
6	Lain-lain	22.902.042.598,13	25.276.752.916,15
7	EKUITAS AKHIR	2.166.527.474.240,73	1.963.490.479.281,09

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Bpkd	
5	B. Pembangunan	
6	Inspektoral	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

No	Uraian	2018	2017
1	2	3	4
52	Arus Kas Dari Aktivitas Pembiayaan		
53	Arus Masuk Kas		
54	Pencatatan Dana Cadangan	0,00	0,00
55	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00
56	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00
57	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
58	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00
59	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
60	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00
61	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0,00	0,00
62	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00
63	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00
64	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
65	Jumlah Arus Masuk Kas (54 s.d. 64)	0,00	0,00
66	Arus Keluar Kas		
67	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
68	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	1.500.000.000,00	2.400.000.000,00
69	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00
70	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
71	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00
72	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
73	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00
74	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0,00	0,00
75	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00
76	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00
77	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
78	Pemberian Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
79	Jumlah Arus Keluar Kas (67 s.d. 78)	1.500.000.000,00	2.400.000.000,00
80	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pembiayaan (65 - 79)	(1.500.000.000,00)	(2.400.000.000,00)
81	Arus Kas Dari Aktivitas Non Anggaran		
82	Arus Masuk Kas		
83	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	67.456.004.016,17	75.740.258.679,78
84	Penerimaan Hutang Jangka Pendek Lainnya	0,00	60.000.000,00
85	Saldo Kas Dana Bansos	13.710.497,20	12.795.944,92
86	Jumlah Arus Masuk Kas (83 s.d. 85)	67.479.714.513,37	75.613.054.624,70
87	Arus Keluar Kas		
88	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	67.608.000.056,17	75.602.156.800,78
89	Pembayaran Hutang Jangka Pendek Lainnya	60.000.000,00	1.342.500,00
90	Uang Muka Belanja Yang Belum dipertanggungjawabkan	91.305.973,00	
91	Koreksi Silpa Tahun Lalu	0,00	8.023.400,00
92	Koreksi Silpa Tahun Lalu (Kas Dana BOS Sekolah Swasta)	1.905.000,00	
93	Penyerahan saldo Kas BOS (SMK/SMU) Tahun 2016 Ke Pemerintah Provinsi	0,00	65.255.355,00
94	Koreksi Dana BOS TA. 2016	0,00	36.373.240,00
95	Koreksi Kas Bansos Tahun Lalu	0,00	1.266.910,20
96	Penyetoran Penerimaan Ret. Pel Kesehatan tahun lalu	0,00	11.404.000,00
97	Jumlah Arus Keluar Kas (88 s.d. 96)	67.762.211.029,17	75.725.822.205,98
98	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Non Anggaran (86 - 97)	(282.496.515,80)	87.232.416,72
99	Kensikan/Penurunan Kas (33 + 51 + 80 + 98)	12.653.606.009,61	(55.561.259.675,58)
100	Saldo Awal Kas	27.825.259.937,73	83.386.519.513,31
101	Saldo Akhir Kas (99 + 100)	40.478.665.947,34	27.825.259.937,73
102	Saldo Akhir Kas di BUD	39.940.090.755,57	26.984.075.422,44
103	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	18.629.261,00	19.318.000,00
104	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	5.817.500,00
105	Saldo Akhir Kas di Bendahara BLUD	102.904.187,65	139.556.745,37
106	Saldo Akhir Kas Lainnya	354.597.490,60	348.432.765,00
107	Saldo Kas BOS	5.876.810,00	204.458.873,00
108	Saldo Kas Bantuan Sosial	56.765.442,12	123.600.631,92
109	Saldo Akhir Kas (102 s.d. 108)	40.478.665.947,34	27.825.259.937,73

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Bpkd	
5	B. Pembangunan	
6	Inspektoral	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARAF MABSUS

No	Uraian Rincian Piutang	Tahun Pengakuan Piutang	Saldo Awal Piutang	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo Akhir Piutang
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5-6
6	PIUTANG TRANSFER PEMERINTAH - PROVINSI					
	Pajak Kendaraan Bermotor [PKB]	2018	8.186.182.286,04	10.655.711.215,84	10.551.545.048,47	8.290.348.433,41
	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor [BBN - KB]	2018	6.907.705.889,02	10.661.501.568,13	9.267.478.359,04	8.301.729.098,11
	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor [PBB - KB]	2018	13.770.738.998,32	18.425.007.136,12	18.016.082.920,78	14.179.653.213,66
	Pajak Pengambilan&Pemanfaatan Air Permukaan (APT)	2018	227.768.849,30	282.694.248,61	290.899.704,28	219.563.393,63
	Pajak Rokok	2018	0,00	19.361.239.616,85	19.361.239.616,85	0,00
	Sub Jumlah		29.092.396.002,68	59.386.153.785,55	57.487.255.649,42	30.991.294.138,81
7	PIUTANG HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN					
	Bagian Laba PT Bank Lampung	2018	0,00	3.409.190.602,76	3.409.190.602,76	0,00
	Sub Jumlah		0,00	3.409.190.602,76	3.409.190.602,76	0,00
8	PIUTANG LAIN - LAIN PENDAPATAN YANG SAH					
	Dana Insentif Daerah	2018	0,00	16.750.000.000,00	16.750.000.000,00	0,00
	Pemerintah (Dana Penetapan SPM DIKDAS)	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	Piutang Hibah Air Minum Perkotaan	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	Piutang Dana BOS	2018	0,00	32.166.520.000,00	32.166.520.000,00	0,00
	Sub Jumlah		0,00	48.916.520.000,00	48.916.520.000,00	0,00
	JUMLAH PIUTANG NETTO		33.056.319.561,88	1.128.179.687.601,66	1.124.850.567.784,07	36.385.449.379,27

BUPATI LAMPUNG BARAT ,

PARAF KOORDINASI		PARAF
NO	JABATAN	
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Bpk	
5	B. Pambanngan	
6	Inspektord	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

PAROSIL MABSUS

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH
TAHUN ANGGARAN 2018

No	Uraian Rincian Piutang	Saldo Akhir Piutang	Saldo Awal Penyisihan Piutang	Penambahan Penyisihan Piutang	Pengurangan Penyisihan Piutang	Saldo Akhir Penyisihan Piutang
		3	4	5	6	7 = 4+5-6
1	PIUTANG PAJAK DAERAH					
	Piutang Pajak Losmerv/ Rumah Makan/ Restoran	7.278.400,00	0,00	36.392,00		36.392,00
	Piutang PBB-P2	33.301.347,00	661.208.092,47	0,00	646.225.153,22	14.982.929,25
	Sub Jumlah	40.579.747,00	661.208.092,47	36.392,00	646.225.153,22	15.019.321,25
2	PIUTANG RETRIBUSI DAERAH					
	Retribusi Jasa Usaha					
	Pemakaian Kekayaan Daerah - RUMDIN	425.000,00	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00
	Retribusi Jasa Umum					
	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	16.301.470,00	44.981,00	8.987.745,35	0,00	9.032.726,35
	Sub Jumlah	16.726.470,00	44.981,00	8.989.870,35	0,00	9.034.851,35
3	LAIN-LAIN PAD YANG SAH					
	Pelayanan Kesehatan	5.244.246.300,00	15.853.507,00	10.387.724,50	0,00	26.221.231,50
	Pelayanan Lain-lain	0,00	357.000,00	0,00	357.000,00	0,00
	Pendapatan dari UPT BLUD Perkuatan Permodalan	89.471.058,48	59.960.559,00	5.414.461,12	0,00	65.385.020,12
	Piutang Pendapatan Lainnya atas Denda PBB P2	3.131.867,00	1.311.911,79	0,00	1.090.155,30	221.756,49
	Sub Jumlah	5.336.849.023,48	77.502.977,79	15.782.185,62	1.447.155,30	91.838.008,11
4	PIUTANG TRANSFER PEMERINTAH - PROVINSI					
	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	8.290.348.433,41	40.930.911,32	520.830,85	0,00	41.451.742,17
	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN - KB)	8.301.729.098,11	34.538.529,45	6.970.116,04	0,00	41.508.845,49
	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB - KB)	14.179.653.213,66	88.853.694,99	2.044.571,08	0,00	70.898.266,07
	Pajak Pengambilan&Pemanfaatan Air Permukaan (APT)	219.563.393,83	1.138.844,25	0,00	41.027,28	1.097.816,97
	Pajak Rokok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub Jumlah	30.991.294.138,81	145.461.980,01	9.535.517,96	41.027,28	154.956.470,70
	JUMLAH	36.385.449.379,27	884.218.021,27	34.343.965,94	647.713.335,80	270.848.651,41

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI	
NO	JABATAN
1	SETDAKAB
2	ASSISTEN
3	ASSISTEN
4	BPKD
5	BK Pembangunan
6	Inspektur
7	
8	
9	
10	KABAG HUKUM

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR
TAHUN ANGGARAN 2018

NO	URAIAN RINCIAN DANA BERGULIR	DASAR	POKOK DANA BERGULIR			PENYISIHAN DANA BERGULIR			NRV DANA BERGULIR
			Saldo Awal Dana Bergulir	Penambahan/ (Pengurangan)	Saldo Akhir Dana Bergulir	Saldo Awal Penyisihan Dana Bergulir	Penambahan/ (Pengurangan)	Saldo Akhir Penyisihan Dana Bergulir	
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10 = (9-8)
1	Penggaliran APBD TA. 2003	SK Bupati No. B/125/KPTS/IV.09/2003	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00
2	Penggaliran APBD TA. 2004	SK Bupati No. B/219/KPTS/IV.09/2004	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00
3	Penggaliran APBD TA. 2005	SK Bupati No. B/206/KPTS/IV.09/2005	305.000.000,00	0,00	305.000.000,00	0,00	0,00	0,00	305.000.000,00
4	Penggaliran APBD TA. 2006	SK Bupati No. B/273/KPTS/IV.09/11/2006	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00
5	Penggaliran APBD TA. 2007	SK Bupati No. B/288/KPTS/IV.09/XII/2007	280.000.000,00	0,00	280.000.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000.000,00
6	Dialihkan ke Kab. Peselir Barat	SK Bupati No. B/433/KPTS/II.14/2014	(196.386.500,00)	0,00	(196.386.500,00)	0,00	0,00	0,00	(196.386.500,00)
7	Total Penyisihan Putang	-	0,00	0,00	0,00	707.889.997,50	125.490.685,65	833.380.683,15	(833.380.683,15)
	JUMLAH		1.318.613.500,00	0,00	1.318.613.500,00	707.889.997,50	125.490.685,65	833.380.683,15	485.232.816,85

BUPATI LAMPUNG BARAT,


PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI	
NO	JABATAN
1	SEKRETARIS
2	ASISTEN I
3	ASISTEN III
4	BPKD
5	B. Pembangunan
6	Inspektoral
7	
8	
9	
10	KABAG HUKUM

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

No.	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/Lembaga/ Pihak Ketiga	Dasar hukum Penyertaan	Bentuk Penyertaan n Modal (Investasi Daerah)	Jumlah Penyertaan n Modal Daerah	Jumlah Modal yang telah disertakan sampai dengan awal tahun	Penyertaan modal Tahun ini	Jumlah Modal yang telah disertakan sampai dengan akhir tahun ini	Sisa modal yang belum disertakan	Hasil penyertaan modal (investasi) daerah tahun ini	Jumlah modal (investasi) yang diterima kembali tahun ini	Jumlah sisa modal (investasi) yang disertakan sampai dengan tahun ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7+8	10 = 8 - 9	11	12	13 = 9 - 12
1	1992/1993	PT. Bank Lampung	Perda Kab. Lampung Barat No. 14 Tahun 2010			9.707.720.407,00	500.000.000,00	10.207.720.407,00	0,00	3.409.190.602,76	0,00	10.207.720.407,00
2		PDAM Limau Kunci	Perda Tk. II Lampung Barat No. 12/1996			9.967.675.906,00	0,00	9.967.675.906,00	0,00	0,00	0,00	9.967.675.906,00
3	2011	PT. Pesagi Mandiri Perkasa	Perda Kab. Lampung Barat No. 16 Tahun 2010			13.995.725.000,00	0,00	13.995.725.000,00	0,00	0,00	3.361.996.000,00	10.633.729.000,00
4	2010	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Lampung Barat	Perda Kab. Lampung Barat No. 7 Tahun 2010			4.650.000.000,00	1.000.000.000,00	5.650.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.650.000.000,00
						38.421.121.313,00	1.500.000.000,00	39.921.121.313,00	0,00	3.409.190.602,76	3.361.996.000,00	36.459.125.313,00

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	BpkO	
5	B. Pembangunan	
6	Inspektur	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,


PAROSIL MABSUS

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
 DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2018

No	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	(dalam rupiah)	
					Saldo Akhir	6=(3+4-5)
1	2	3	4	5		
1	Tanah	126.058.993.860,00	15.573.590.004,00	0,00		141.630.583.864,00
2	Peralatan dan Mesin	283.673.198.447,29	34.127.956.956,83	0,00		317.801.155.404,12
3	Gedung dan Bangunan	605.372.002.815,54	93.670.890.652,00	0,00		699.042.893.467,54
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.479.773.908.593,24	156.113.947.658,63	0,00		1.635.887.856.251,87
5	Aset Tetap Lainnya	39.786.224.096,39	6.996.435.459,00	0,00		46.782.659.555,39
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	9.744.349.637,00	748.944.000,00	0,00		10.493.293.637,00
7	Akumulasi Penyusutan	(816.414.079.043,00)	(128.238.850.605,00)	0,00		(944.652.929.648,00)
Jumlah		1.727.992.598.406,46	178.992.914.125,46	0,00		1.906.985.512.531,92

BUPATI LAMPUNG BARAT,


 PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	Bpkd	
5	B. Pembangunan	
6	Inspektoriat	
7		
8		
9	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN XIII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
 NOMOR 1 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2018

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
 DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP
 PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018
1	2	3	4
1	Tanah	126.056.993.860,00	141.630.583.864,00
2	Peralatan dan Mesin	283.873.198.447,29	317.801.155.404,12
3	Gedung dan Bangunan	605.372.002.815,54	699.042.893.467,54
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.479.773.908.593,24	1.635.887.856.251,87
5	Aset Tetap Lainnya	39.786.224.096,39	46.782.659.555,39
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	9.744.349.637,00	10.493.293.637,00
7	Akumulasi Penyusutan	(816.414.079.043,00)	(944.652.929.648,00)
	Jumlah	1.727.992.598.406,46	1.906.985.512.531,92

BUPATI LAMPUNG BARAT,



PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Bptco	
5	B. Perumahan	
6	Inspektoral	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN XIV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
 NOMOR 1 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2018

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
 DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM PEKERJAAN
 PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018
1	2	3	4
1	KDP Gedung dan Bangunan - (Dinas TPH)	31.966.000,00	31.966.000,00
2	KDP Gedung dan Bangunan - (Dinas PU)	4.446.391.700,00	1.913.058.500,00
3	KDP Jalan, Irigasi, Jaringan - (Dinas PU)	5.265.991.937,00	4.820.276.937,00
4	KDP Gedung dan Bangunan - (Balitbang)	0,00	3.727.992.200,00
	Jumlah	9.744.349.637,00	10.493.293.637,00

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	BPKD	
5	Bx Pembangunan	
6	Kns p.k. terak	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN XV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2018

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018
1	2	3	4
1	Aset Tak Berwujud	2.002.567.491,00	2.309.817.491,00
2	Amortisasi Aset Tak Berwujud	(1.274.077.492,44)	(1.556.868.909,89)
3	Aset Lain-Lain	139.984.954.416,71	157.089.251.083,71
4	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(985.313.244,00)	(9.145.141.136,00)
	Jumlah	139.728.131.171,27	148.697.058.528,82

BUPATI LAMPUNG BARAT,


PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI	
NO	JABATAN
1	SETDAKAB
2	ASSISTEN I
3	ASSISTEN II
4	BPKD
5	B. Pembangunan
6	Inspektorat
7	
8	
9	
10	KABAG HUKUM

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

NO	TUJUAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIRENCANAKAN	SALDO AWAL	TRANSFER DARI KAS UMUM DAERAH	TRANSFER KE KAS UMUM DAERAH	SALDO AKHIR	SISA DANA YANG BELUM DICADANGKAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
JUMLAH								

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARAF KOORDINASI		PARAF
NO	JABATAN	
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	Bpk	
5	B. Pembinaan	
6	Insp. Ketert	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN XVII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
 NOMOR 1 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2018

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018
1	2	3	4
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK):		
	Utang PPh Pasal 21	34.284.492,00	0,00
	Utang PPh Pasal 22	114.040.101,00	30.259.000,00
	Utang PPh Pasal 23	26.000,00	0,00
	Utang PPN	23.736.447,00	450.000,00
	Utang Pajak Daerah	1.618.000,00	0,00
	Sub Jumlah	173.705.040,00	30.709.000,00
2	Utang Belanja		
	Utang Belanja Pegawai	2.314.311.672,99	3.200.126.215,99
	Utang Belanja Jasa	331.898.725,00	351.158.575,00
	Utang Belanja Barang	1.310.651.876,00	3.416.993.099,00
	Sub Jumlah	3.956.862.273,99	6.968.277.889,99
3	Utang Jangka Pendek Lainnya		
	Lebih Bayar Dana BOS dari Provinsi	60.000.000,00	0,00
	Lebih Bayar DBH Iuran Tetap Landrent	0,00	0,00
	Lebih Bayar DBH Pungutan Hasil Perikanan	0,00	0,00
	Lebih Bayar DBH Pertambangan Minyak Bumi	0,00	0,00
	Lebih Bayar DBH Pertambangan Panas Bumi Iuran Tetap	0,00	0,00
	Uang Titipan BPJS Untuk Pegawai Puskesmas	0,00	0,00
	Sub Jumlah	60.000.000,00	0,00
	Jumlah	4.190.567.313,99	6.998.986.889,99

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	Bpkd	
5	B. Pembangunan	
6	Inspektorat	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN XVIII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
 NOMOR 1 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2018

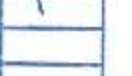
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
 DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
 PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018
1	2	3	4
1	Utang Jasa Medik	431.556.186,96	431.556.186,96
2	Utang Tunjangan Profesi Guru PNSD	0,00	97.824.100,00
Jumlah		431.556.186,96	529.380.286,96

BUPATI LAMPUNG BARAT,


 PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	BpkD	
5	BpPamSampunan	
6	Inspektoral	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN DAN
DIANGGARKAN LAGI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA
TAHUN ANGGARAN 2018

No	Kode Kegiatan	Judul Kegiatan	Jumlah Realisasi Tahun 2016, 2017 dan 2018			Jumlah Akumulasi Realisasi s.d. Akhir Tahun	Jumlah yang Dianggarkan dalam APBD Tahun Berikutnya
			Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018		
1	2	3	4	5	6	7 = (4+5+6)	8
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
JUMLAH							

PARAF KOORDINASI									
NO	JABATAN	PARAF							
1	SETDAKAB								
2	ASISTEN I								
3	ASISTEN II								
4	BPKD								
5	B. Pemasangan								
6	Inspektoral								
7									
8									
9									
10	KABAG HUKUM								

BUPATI LAMPUNG BARAT,


PAROSIL MABSUS

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH
PENDAPATAN, BESAN, DAN LABA (RUGI) BERSIH

No	Pernyataan Daerah Tahun	Saldo Awal (a)	Saldo Akhir (b)	Aktiva Lancar	Aktiva Tidak Lancar	Aktiva Lainnya	Total Aktiva	Kewajiban Jangka Pendek	Kewajiban Jangka Panjang	Total Kewajiban	Modal	Tambahan Modal Daerah	DP/DOG	Ekuitas Lainnya	Laba Ditahan	Total Ekuitas	% Saham	Kepemilikan Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8= 5+6+7	9	10	11= 9+10	12	13	14	15	16	17	18	19= 17 x 18
1	Bidang Pertanian:																	
	PT. BPRS			32.182.263.476,87	462.587.302,00	305.783.996,00	32.951.014.774,87	24.876.278.033,22	0,00	24.876.278.033,22	6.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.074.736.741,65	8.074.736.741,65	94,142%	7.601.725.989,60
	Sub Total(1)			32.182.263.476,87	462.587.302,00	305.783.996,00	32.951.014.774,87	24.876.278.033,22	0,00	24.876.278.033,22	6.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.074.736.741,65	8.074.736.741,65	94,142%	7.601.725.989,60
2	Bidang Jasa Lainnya (Distribusi Air Bersih)																	
	PDAM Lima Kunci			4.364.435.330,66	3.590.887.251,78	0,00	7.955.303.091,44	76.100.771,00	0,00	76.100.771,00	13.996.273.112,00	0,00	0,00	847.538.700,00	(7.066.609.491,56)	7.878.202.320,44	64,690%	5.097.025.355,38
	Sub Total(2)			4.364.435.330,66	3.590.887.251,78	0,00	7.955.303.091,44	76.100.771,00	0,00	76.100.771,00	13.998.273.112,00	0,00	0,00	847.538.700,00	(7.066.609.491,56)	7.878.202.320,44	64,690%	5.097.025.355,38
3	Bidang Perdagangan:																	
	PT Pemasri Mandiri			9.095.405.207,00	5.364.583,00	162.633.817,00	9.263.453.607,00	0,00	0,00	0,00	10.533.729.000,00	0,00	0,00	0,00	(1.370.275.393,00)	9.263.453.607,00	100,00%	9.263.453.607,00
	Sub Total(3)			9.095.405.207,00	5.364.583,00	162.633.817,00	9.263.453.607,00	0,00	0,00	0,00	10.533.729.000,00	0,00	0,00	0,00	(1.370.275.393,00)	9.263.453.607,00	100,00%	9.263.453.607,00
	Total Seluruh Bidang			45.642.104.523,53	4.059.195.136,78	468.467.813,00	60.188.771.473,31	24.962.378.884,22	0,00	24.962.378.884,22	30.532.902.112,00	0,00	0,00	947.538.700,00	(8.262.148.143,01)	26.217.393.668,09		21.962.264.061,89

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS	
NO. JABATAN	PAROSIL MABSUS
1. KEPIMPINAN	
2. KEMENTERIAN	
3. ASISTENSI	
4. Bpk	
5. B. Pambanayawan	
6. Inspektoral	
7.	
8.	
9.	
10. KABAG HUKUM	

PEMERINTAH PEKON
KECAMATAN BE-KABUPATEN LAMPUNG BARAT
IKHTISAR LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
MENURUT KLASIFIKASI KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN DESA SERTA BELANJA DESA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018

NO.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI		LEBIH/ (KURANG)		KETERANGAN
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PENDAPATAN DESA						
2	Pendapatan Asli Desa						
3	Hasil Usaha	108.486.030,00	88.871.820,78	81,91	19.623.209,22	18,09	
4	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	0,00	11.562,37	0,00	(11.562,37)	0,00	
5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa	57.107.088,57	80.756.887,09	108,38	(3.649.598,52)	(6,38)	
6	Jumlah Pendapatan Asli Desa (1 s.d. 5)	165.602.118,57	149.840.070,24	90,36	15.862.048,33	9,64	
7							
8	Pendapatan Transfer						
9	Dana Desa	112.483.520.996,25	112.483.520.977,00	100,00	(14.980,75)	(0,00)	
10	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kab/ Kota	1.102.410.975,00	1.107.018.500,00	100,42	(4.608.525,00)	(0,42)	
11	Alokasi Dana Desa (ADD)	54.796.383.002,00	54.796.402.984,00	100,00	(19.982,00)	(0,00)	
12	Bantuan Keuangan:						
13	Bantuan Keuangan Provinsi	5.781.000.000,00	5.861.000.000,00	97,92	120.000.000,00	2,08	
14	Bantuan Keuangan Kabupaten/ Kota	859.220.000,00	719.850.740,00	109,21	(80.730.740,00)	(9,21)	
15	Jumlah Bantuan Keuangan (13 s.d. 14)	6.440.220.000,00	6.380.850.740,00	99,08	59.299.260,00	0,92	
16	Jumlah Pendapatan Transfer (9 s.d.11 + 15)	174.824.510.973,25	174.769.894.201,00	99,97	54.625.772,25	0,03	
17							
18	Pendapatan Lain-lain						
19	Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga yg tidak Mengikat	17.530.000,00	17.530.000,00	100,00	0,00	0,00	
20	Lain-lain pendapatan desa yang sah	337.680.734,00	367.689.217,06	0,00	(229.808.483,06)	0,00	
21	Jumlah Pendapatan Lain-lain (19 s.d. 20)	355.410.734,00	385.219.217,06	164,66	(229.808.483,06)	(64,66)	
22							
23	JUMLAH PENDAPATAN (6+16+21)	175.348.832.825,82	175.804.753.488,30	100,09	(159.220.862,48)	(0,09)	
24							
25	BELANJA DESA						
26	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA						
27	Belanja Pegawai	35.189.250.000,00	35.141.834.000,00	99,92	27.616.000,00	0,06	
28	Belanja Barang dan Jasa	11.163.285.811,48	10.824.488.080,81	96,17	538.796.720,88	4,83	
29	Belanja Modal	3.686.233.013,00	3.595.432.638,00	97,54	90.800.375,00	2,46	
30	Jumlah Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa (27 s.d. 29)	50.016.748.824,48	49.361.535.728,81	98,69	687.213.095,88	1,31	
31							
32	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA						
33	Belanja Barang dan Jasa	33.633.953.134,92	33.433.745.839,74	99,40	200.217.295,20	0,60	
34	Belanja Modal	57.919.800.880,75	57.512.409.430,73	99,30	407.391.450,01	0,70	
35	Jumlah Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa (33 s.d. 34)	91.553.754.015,68	90.946.155.270,47	99,34	607.608.745,21	0,66	
36							
37	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN						
38	Belanja Barang dan Jasa	10.159.445.500,80	9.790.965.235,78	96,37	368.480.264,84	3,63	
39	Belanja Modal	1.446.343.261,48	1.361.669.720,48	94,14	84.783.541,00	5,86	
40	Jumlah Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan (38 s.d. 39)	11.605.788.762,28	11.152.624.956,26	96,09	453.263.806,84	3,91	
41							
42	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT						
43	Belanja Barang dan Jasa	19.931.684.890,07	18.547.311.338,80	93,06	1.384.373.541,17	6,96	
44	Belanja Modal	5.422.380.929,33	5.281.877.473,60	97,41	140.503.455,73	2,59	
45	Jumlah Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat (43 s.d. 44)	25.354.065.809,40	23.829.188.812,40	93,96	1.524.876.996,90	6,01	
46							
47	BIDANG TAK TERDUGA						
48	Belanja Barang dan Jasa	130.198.922,50	45.500.000,00	34,96	84.698.922,50	65,04	
49	Jumlah Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat (48)	130.198.922,50	45.500.000,00	34,96	84.698.922,50	65,04	
50							
51	JUMLAH BELANJA (30+35+40+45+49)	175.682.666.334,17	175.334.904.767,83	99,14	3.327.651.666,33	1,88	
52							
53	SURPLUS/ DEFISIT (23-51)	(3.317.033.608,34)	189.848.720,47	(5,12)	(3.496.882.328,81)	105,12	
54							
55	PEMBIAYAAN						
56	Penerimaan Pembiayaan						
57	SILPA	3.241.111.554,28	3.860.561.395,07	119,73	(639.449.840,81)	(19,73)	
58	Penerimaan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	Hasil Kekayaan Desa Yang di Pisahkan	22.153.016,09	22.153.016,09	100,00	0,00	0,00	
60	Jumlah Penerimaan Pembiayaan (57 s.d. 59)	3.263.264.570,38	3.902.714.411,16	119,60	(639.449.840,81)	(19,60)	
61							
62	Pengeluaran Pembiayaan						
63	Modal usaha BUM Desa (Selain simpan pinjam)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64	Peningkatan kelompok simpan pinjam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (63 s.d. 64)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66							
67	Pembayaran Kena (65 - 66)	3.263.264.570,38	3.902.714.411,16	119,60	(639.449.840,81)	(19,60)	
68							
69	SISA/LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (53-67)		4.072.563.131,63				

PARAF KOORDINASI

1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Bpk	
5	B. Pambayungan	
6	Inspektoral	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAFOSIL MABSUS

NO	URAIAN	JUMLAH DPA	REALISASI	(%)	SISA ANGGARAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
3	Kec. Bandar Negeri Suoh	384.919.550,00	384.204.925,00	99,81	33.663.000,00	
	Belanja Tidak Langsung	217.100.000,00	186.500.000,00	85,91	30.600.000,00	
	Belanja Langsung	239.738.300,00	236.675.300,00	98,72	3.063.000,00	
4	Kec. Batu Brak	444.424.500,00	421.644.515,00	94,87	19.838.831,00	
	Belanja Tidak Langsung	228.823.000,00	228.436.837,00	99,83	386.163,00	
	Belanja Langsung	284.459.000,00	265.006.332,00	93,16	19.452.668,00	
5	Kec. Batu Ketulis	388.518.400,00	377.371.803,00	97,13	11.678.772,00	
	Belanja Tidak Langsung	235.200.000,00	228.440.228,00	97,13	6.759.772,00	
	Belanja Langsung	261.590.000,00	256.671.000,00	98,12	4.919.000,00	
6	Kec. Belalau	453.993.000,00	453.869.500,00	99,97	145.441.425,00	
	Belanja Tidak Langsung	430.800.000,00	287.000.000,00	66,62	143.800.000,00	
	Belanja Langsung	264.094.000,00	262.452.575,00	99,38	1.641.425,00	
7	Kec. Gedung Surian	414.693.000,00	388.289.888,00	93,63	9.941.848,00	
	Belanja Tidak Langsung	202.500.000,00	202.500.000,00	100,00	-	
	Belanja Langsung	263.956.000,00	254.014.152,00	96,23	9.941.848,00	
8	Kec. Kebun Tebu	389.715.550,00	385.072.550,00	98,81	12.553.300,00	
	Belanja Tidak Langsung	228.100.000,00	227.400.000,00	99,69	700.000,00	
	Belanja Langsung	260.745.000,00	248.891.700,00	95,45	11.853.300,00	
9	Kec. L. Seminung	379.033.500,00	372.813.500,00	98,36	12.268.000,00	
	Belanja Tidak Langsung	216.400.000,00	204.400.000,00	94,45	12.000.000,00	
	Belanja Langsung	240.361.000,00	240.093.000,00	99,89	268.000,00	
10	Kec. Pagar Dewa	359.715.000,00	319.552.000,00	88,83	2.947.305,00	
	Belanja Tidak Langsung	189.000.000,00	189.000.000,00	100,00	-	
	Belanja Langsung	244.212.000,00	241.264.695,00	98,79	2.947.305,00	
11	Kec. Sekincau	420.138.300,00	392.866.550,00	93,51	10.306.298,00	
	Belanja Tidak Langsung	240.500.000,00	240.500.000,00	100,00	-	
	Belanja Langsung	431.134.000,00	420.827.702,00	97,61	10.306.298,00	
12	Kec. Sukau	420.313.000,00	407.406.512,00	96,93	8.128.140,00	
	Belanja Tidak Langsung	261.900.000,00	260.000.000,00	99,27	1.900.000,00	
	Belanja Langsung	267.654.000,00	261.425.860,00	97,67	6.228.140,00	
13	Kec. Sumber Jaya	397.013.000,00	380.753.602,00	95,90	1.630.893,00	
	Belanja Tidak Langsung	184.878.000,00	184.836.182,00	99,98	41.818,00	
	Belanja Langsung	419.250.000,00	417.660.925,00	99,62	1.589.075,00	
14	Kec. Suoh	415.277.000,00	378.686.000,00	91,19	28.575.000,00	
	Belanja Tidak Langsung	213.200.000,00	194.100.000,00	91,04	19.100.000,00	
	Belanja Langsung	291.545.000,00	282.070.000,00	96,75	9.475.000,00	
15	Kec. Way Tenong	427.310.600,00	421.159.064,00	98,56	19.131.908,00	
	Belanja Tidak Langsung	233.200.000,00	232.400.000,00	99,66	800.000,00	
	Belanja Langsung	431.973.000,00	413.641.092,00	95,76	18.331.908,00	
	Belanja Tidak Langsung	3.489.801.000,00	3.267.713.247,00	93,64	222.087.753,00	
	Belanja Langsung	4.780.905.100,00	4.673.754.906,00	97,76	107.150.194,00	
	Total Belanja	8.270.706.100,00	7.941.468.153,00	96,02	329.237.947,00	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	Bpk	
5	B. Pembangunan	
6	Inspektoral	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

PAROSIL MABSUS